

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU TIONGKOK SEBAGAI USAHA REPUBLIK RAKYAT CINA DALAM MENCEGAH KEMERDEKAAN TAIWAN DITINJAU DARI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2625

Jhonson Halim

NPM: 1551105

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti Kebijakan Satu Tiongkok yang dikeluarkan oleh pemerintah RRC mengenai kekuasaan atas bangsa Cina yang juga melahirkan Hukum-Anti Pemisahan Diri pada tahun 2005. Penelitian terhadap kebijakan ini dilakukan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tentang asas kesetaraan hak dan hak penentuan nasib sendiri.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa objek penelitian dengan bahan hukum yang ada. Penulis juga menggunakan pendekatan *Statute approach* yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa Kebijakan Satu Tiongkok telah menyebabkan beberapa dampak pada sektor hubungan internasional dan kemerdekaan Taiwan. Penulis juga menyimpulkan bahwa Taiwan memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah RRC dalam hal kebijakan tersebut, serta terdapat ketidaksesuaian antara Kebijakan Satu Tiongkok dengan hukum internasional yaitu Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB 2625.

Kata Kunci: Kebijakan, Kemerdekaan, Internasional